



## Kemiskinan: Ancaman Persatuan Indonesia Pancasila sebagai Pendekatan untuk Mengurangi Kemiskinan

Tri Mulyani Kartini<sup>1</sup>, Vania Lalita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dosen Manajemen, Fakultas Ekonomi&Bisnis, [tere.tmk@gmail.com](mailto:tere.tmk@gmail.com), Universitas Pelita Bangsa

<sup>2</sup> Fakultas Economic&Management, [vaniyalalita@gmail.com](mailto:vaniyalalita@gmail.com), China Agriculture University

### *Abstract*

*Poverty is one of the major global problems in the world today. According to UN data, 836 million people still live in extreme poverty. As of September 2016, Central Statistics Agency records show that around 27.76 million Indonesian civilians live below the poverty line. Indonesia adheres to Pancasila as the state ideology, although it has Pancasila as the basis of the state, the problem of poverty is still unavoidable by the Indonesian government. Furthermore, in this paper we would like to discuss and describe how Pancasila can be the basis for reducing poverty in order to create a better society.*

**Keywords:** *Poverty Threats to Indonesian Unity, Pancasila foundation*

### **Abstrak**

Kemiskinan adalah salah satu masalah global utama di dunia saat ini. Menurut data PBB, 836 juta orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Per September 2016, catatan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 27,76 juta penduduk sipil Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Indonesia menganut Pancasila sebagai ideologi negara, meskipun memiliki Pancasila sebagai dasar negara, masalah kemiskinan ini tetap tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, dalam tulisan ini kami ingin membahas dan menguraikan bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan untuk mengurangi kemiskinan guna menciptakan masyarakat yang lebih baik.

**Kata kunci:** Kemiskinan Ancaman Persatuan Indonesia, landasan Pancasila

## I. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kemiskinan sebagai “Penolakan pilihan dan peluang, pelanggaran martabat manusia. Ini berarti kurangnya kapasitas dasar untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Ini berarti tidak memiliki cukup untuk memberi makan dan pakaian [e] keluarga, tidak memiliki sekolah atau klinik untuk pergi, tidak memiliki tanah untuk menanam makanan atau pekerjaan untuk mencari nafkah, tidak memiliki akses ke kredit. Ini berarti ketidakamanan, ketidakberdayaan dan pengucilan individu, rumah tangga dan masyarakat. Ini berarti kerentanan terhadap kekerasan, dan sering kali menyiratkan hidup di lingkungan yang marginal atau rapuh, tanpa akses ke air bersih atau sanitasi.” Mengurangi kemiskinan telah menjadi perhatian internasional. Hal ini telah menjadi bagian dari United Nations Sustainable Development Goals (SGD's) yang dideklarasikan dalam paragraf 54 Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 25 September 2015. United Nation's Sustainable Development Goals merupakan kumpulan dari 17 tujuan global yang salah satu tujuannya adalah untuk memberantas kemiskinan ekstrim bagi semua orang di mana-mana, saat ini diukur sebagai orang yang hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari.

Indonesia sebagai negara terpadat ke-4 di dunia juga prihatin dengan masalah ini. Lebih dari 10% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Meningkatnya tingkat ketimpangan di Indonesia juga menjadi perhatian utama negara saat ini. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secepat mungkin dapat menjadi ancaman bagi persatuan Indonesia.

Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar fundamental utama negara. Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia sehingga semua aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, tidak boleh melanggar dan menyimpang dari Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum atau sumber ketertiban hukum Indonesia yang pada hakikatnya merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum dan moral yang meliputi suasana mistik dan watak bangsa Indonesia. “Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara” secara tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sebagai berikut: “Penempatan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara sesuai dengan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa, sehingga setiap

substansi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”. Dengan demikian, Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia juga mencerminkan jiwa dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai alat integral bagi cita-cita dan gambaran yang tidak bias dari nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini. Pancasila menjadi dasar seluruh kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat sehingga fungsi dan kedudukan Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. bangsa, yaitu menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia.

Pancasila memiliki lima prinsip dan jika seluruh rakyat Indonesia dapat menerapkan prinsip ini dengan cara yang benar dapat membantu negara untuk mengurangi kemiskinan. Prinsip pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” Prinsip ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi norma agama. Setiap agama mendorong pengikutnya untuk beramal serta berbagi apa yang mereka miliki dengan orang yang membutuhkan. Prinsip kedua adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab” Prinsip ini menekankan bahwa setiap manusia perlu diperlakukan dengan hormat sebagai manusia. Prinsip ketiga adalah “Persatuan Indonesia”. Prinsip ini menekankan solidaritas antar bangsa Indonesia sendiri. Sebagai sesama warga negara, Indonesia harus bahu membahu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Asas keempat adalah “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”. Demokrasi yang dilandasi oleh kearifan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari permusyawaratan perwakilan. Asas ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, tujuan utama negara demokrasi adalah mensejahterakan rakyatnya. Asas yang kelima adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia sama derajatnya dengan negara. Mereka akan diperlakukan sama oleh negara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya merupakan bagian dari negara.

## **II. Analisis**

Pancasila telah dikenal sebagai dasar dasar negara Indonesia. Namun, ada beberapa kesalahpahaman dalam implementasinya. Banyak orang Indonesia yang tidak menyadari betapa pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jika nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan

*Kemiskinan: Ancaman Persatuan Indonesia Pancasila sebagai Pendekatan untuk Mengurangi Kemiskinan (Tri mulyani Kartini)*

oleh pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, itu bisa menjadi platform yang berguna yang dapat digunakan untuk mengurangi dan melawan kemiskinan.

### **Sila Pertama Pancasila**

Prinsip pertama adalah “Percaya kepada satu-satunya Tuhan.” Prinsip ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi norma agama. Setiap agama mendorong pengikutnya untuk beramal serta berbagi apa yang mereka miliki dengan orang yang membutuhkan. Pemerintah Indonesia secara hukum mengakui enam agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Semua agama ini mengajarkan pengikutnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk mencintai orang lain dan selalu jujur.

Beberapa ayat dalam Al-Quran Suci Islam secara khusus menyebutkan tentang sedekah, misalnya dalam Surat Al-Baqarah [2:262] yang menyatakan “Orang-orang yang menafkahkan uangnya di jalan Allah, kemudian tidak mengikuti amal mereka dengan penghinaan atau kerugian, akan menerima balasan mereka dari Tuhan mereka; mereka tidak perlu takut, mereka juga tidak akan bersedih hati.” Dalam Islam ada juga yang disebut “Zakat” yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat adalah pemberian wajib dari sebagian kekayaan seseorang untuk amal. Hal ini dianggap sebagai jenis ibadah dan pemurnian diri. Ini bertujuan untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan.

Dalam Kitab Suci Kristen dan Katolik, beberapa ayat juga menyebutkan tentang amal. Misalnya, "Orang yang murah hati kepada orang miskin meminjamkan kepada Tuhan, Dan Dia akan membalas perbuatan baiknya." (Amsal 19:17). Kitab Suci juga mempromosikan belas kasihan bagi orang lain yang dinyatakan melalui Roma 12:20-21 yang mengatakan “20 Sebaliknya: “Jika musuhmu lapar, beri dia makan; jika dia haus, beri dia minum. Dengan melakukan ini, Anda akan menimbun bara api di kepalanya.” 21 Jangan dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan.”.

Dalam agama Hindu, juga tertulis dalam Kitab Suci Veda yang menyatakan "Berilah sedekah kepada orang miskin karena hari ini kamu kaya dan besok kamu mungkin miskin." (Rig

Veda, Buku 10, himne 117, V 5) dan kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat “Seseorang seharusnya tidak berperilaku terhadap orang lain dengan cara yang tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri. Inilah inti dari moralitas. Semua aktivitas lainnya adalah karena keinginan egois.” (Mahabharata, Anusasana Parva 113.8)

Mencintai dan menghormati orang lain juga disebutkan dalam Tripitaka Buddhisme. “Seseorang seharusnya tidak berperilaku terhadap orang lain dengan cara yang tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri. Inilah inti dari moralitas. Semua aktivitas lainnya adalah karena keinginan egois.” (Mahabharata, Anusasana Parva 113.8). Dalam agama Buddha, mereka juga memiliki konsep Dana yang berarti memberi yang merupakan bagian dari praktik mereka.

Selanjutnya, dalam Konfusianisme juga menyatakan hal yang sama yang dinyatakan oleh agama lain tentang mencintai orang lain. Dalam kitab suci mereka yang mengatakan "Cobalah yang terbaik untuk memperlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan sendiri, dan Anda akan menemukan bahwa ini adalah cara terpendek untuk kebajikan." (Mencius VII.A.4)

Setelah melihat ayat-ayat tersebut dalam berbagai kitab suci tersebut, jika seluruh masyarakat Indonesia apapun agama yang ada di Indonesia menjalankan sila pertama yaitu berbicara tentang agama, mereka akan mengakui betapa pentingnya mencintai sesama dan membantu orang-orang yang di membutuhkan karena mereka hidup di bawah kemiskinan. Jika seluruh rakyat Indonesia menyadari betapa pentingnya prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan mereka, maka dapat menghasilkan rasa kasih sayang yang besar di antara orang Indonesia yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi kemiskinan.

## **Prinsip Kedua**

Prinsip kedua adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab” Prinsip kedua ini menekankan bahwa setiap manusia perlu diperlakukan dengan hormat sebagai manusia. Sebagai manusia, semua orang Indonesia memiliki hak asasinya masing-masing yang harus dihormati oleh orang lain. Namun, hak orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan ini telah dilanggar. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam pasal 23 menyatakan “(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, kebebasan memilih pekerjaan, atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan atas

perlindungan terhadap pengangguran. (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi apa pun, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan yang menjamin bagi dirinya dan keluarganya suatu kehidupan yang layak untuk martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.” Yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 25 yang menyatakan “(1) Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas jaminan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjanda, lanjut usia atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya.” Salah satu faktor utama yang menyebabkan orang jatuh miskin adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Ketika orang menganggur mereka tidak akan memiliki sumber pendapatan utama. Masalah pengangguran ini juga merupakan salah satu dampak dari minimnya pendidikan.

Kemiskinan adalah siklus yang sulit untuk diakhiri, seringkali diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu faktor utama yang dapat membawa seseorang pada kemiskinan adalah kurangnya pendidikan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tahun 2015-2016 terdapat 946.013 siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia sejak disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “...untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” (UUD 1945) . Persoalannya, pendidikan di Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu yang mahal yang tidak mampu dijangkau oleh masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kurangnya pendidikan ini akan menyebabkan mereka menjadi pengangguran atau bekerja sebagai pekerja tingkat rendah seperti buruh yang tidak akan memberikan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka di masa depan, dan kemudian siklus itu akan dimulai lagi dan diteruskan ke generasi penerus mereka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 menyatakan “(1) Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya di tingkat dasar dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan profesional harus tersedia secara umum dan pendidikan tinggi harus dapat diakses secara merata oleh semua orang berdasarkan prestasi.” Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan tentang wajib belajar 12 tahun dan memberikan pendidikan gratis bagi yang membutuhkan, namun Indonesia adalah negara besar,

tidak semua orang Indonesia yang membutuhkannya merasakan keistimewaan pendidikan gratis yang seharusnya menjadi hak mereka. Baik. Pemerintah Indonesia harus bekerja lebih keras untuk memastikan semua rakyatnya mendapatkan hak yang layak mereka dapatkan.

### **Prinsip Ketiga**

Prinsip ketiga adalah “Persatuan Indonesia” Prinsip ketiga adalah “Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan solidaritas antar bangsa Indonesia sendiri. Sebagai sesama warga negara, Indonesia harus bahu membahu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, kita dapat melihat kesenjangan dan ketimpangan sosial yang sangat besar di masyarakat Indonesia. Tingkat ketimpangan Indonesia saat ini dinilai relatif tinggi. Antara tahun 2003 dan 2010, konsumsi per orang untuk 10% orang terkaya Indonesia tumbuh lebih dari 6% per tahun setelah disesuaikan dengan inflasi. Tetapi untuk 40% termiskin, konsumsi tumbuh kurang dari 2% per tahun. Yang menghasilkan peningkatan tajam dalam koefisien Gini selama 15 tahun terakhir dari 0,33 pada tahun 2002 menjadi 0,41 pada tahun 2016.

Ketimpangan yang meningkat ini bisa berbahaya jika diabaikan. Jika masalah ini terus diabaikan di beberapa titik itu bisa menyebabkan revolusi. Per September 2016, catatan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 27,76 juta penduduk sipil Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jika semua orang ini berkumpul dan memulai revolusi, itu akan membuat negara ini kacau balau. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi kita harus melakukan sesuatu untuk mengurangi kemiskinan dan masalah ketimpangan ini.

Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengurangi pemerataan pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan tentang pajak. Tarif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin agar tidak merasa dirugikan. Namun, ini bukan hanya tugas pemerintah, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian tanpa bantuan rakyatnya. Hal yang bisa dilakukan orang Indonesia adalah lebih berempati dengan sesama orang Indonesia. Orang-orang yang kaya, harus mengakui bahwa mereka akan membantu mereka yang membutuhkan. Mereka bisa melakukannya dengan memberikan beasiswa atau membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan.

### **Prinsip Keempat**

Asas keempat adalah “Demokrasi yang dilandasi oleh kearifan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari permusyawaratan perwakilan” Asas ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, tujuan utama negara demokrasi adalah mensejahterakan rakyatnya. Jika prinsip ini dapat dipahami dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia, maka akan membantu negara untuk mengurangi tingkat kemiskinannya.

Salah satu faktor yang membuat kemiskinan tetap hidup di Indonesia adalah banyak anggota parlemen Indonesia yang korup. Pada 2015 saja, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) Indonesia merugi Rp31.077 karena korupsi. Salah satu kasus korupsi terbaru di Indonesia adalah korupsi terkait proyek E-KTP pada 2016. Indonesia kehilangan sekitar Rp2,3 triliun. uangnya untuk proyek ini. Beberapa anggota DPR RI terungkap terlibat korupsi ini.

Kasus ini membuktikan bahwa pemerintahan kita masih penuh dengan korupsi. Hal ini menunjukkan betapa Indonesia tidak lagi menganggap Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman bagi Indonesia sebagai sesuatu yang penting. Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi negara kini hanya ada sebagai bentuk formalitas tanpa niat untuk melaksanakannya. Indonesia harus kembali ke akarnya dan menyadari bahwa Pancasila pedoman hidup mereka dan Penting untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Jika pemerintah Indonesia dapat memahami inti dari prinsip ini, mereka akan menyadari bahwa tujuannya adalah untuk mendistribusikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia karena dalam demokrasi suara rakyat adalah yang terpenting.

### **Prinsip Kelima**

Asas yang kelima adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia sama derajatnya dengan negara. Mereka akan diperlakukan sama oleh negara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya merupakan bagian dari negara. Orang

Indonesia harus mengakui bahwa meskipun mereka memiliki banyak perbedaan, mereka tetap satu. Seluruh rakyat Indonesia harus menyadari bahwa Indonesia adalah milik mereka. Orang Indonesia harus mewujudkan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dengan mengikuti peraturan perundang-undangan Indonesia yang salah satunya tentang membayar pajak.

Indonesia memiliki beberapa jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea & Cukai. Untuk pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi, tarif pajak dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Tarif pajak tergantung pada jumlah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tarif pajaknya. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pemerintah harus menggunakan pajak ini dengan bijaksana untuk mendistribusikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Situasi saat ini menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan belum merata. Beberapa daerah mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daripada yang lain. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dapat menempatkan Indonesia dalam kondisi perpecahan yang berbahaya. Melihat kembali sejarah Indonesia, kita menyaksikan bagaimana Timor Leste, Sipadan, dan Ligitan memisahkan diri dari Indonesia karena tidak merasa menjadi milik Indonesia. Selama beberapa tahun, Indonesia juga menderita beberapa kelompok separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (Gerakan Aceh Merdeka) dan Gerakan Papua Merdeka (Organisasi Papua Merdeka) yang tujuannya adalah untuk memisahkan wilayah mereka dari Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mulai lebih memperhatikan daerah-daerah yang kurang sejahtera di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memainkan peran besar dalam menerapkan prinsip ini. Pemerintah akan mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Sejak Jokowi memulai masa jabatan presiden pada Oktober 2014, Indonesia merilis Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk tunjangan bulanan siswa untuk biaya sekolah, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menyediakan layanan kesehatan gratis dan Kartu Tabungan Keluarga Sejahtera (KKS) dalam rangka untuk mengembangkan kesejahteraan sosial. Namun, meskipun niatnya baik, program ini masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya yang sebenarnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

mengungkapkan masih menemukan kendala dalam mendistribusikan fasilitas ini. Kendala ini terjadi karena ketidakakuratan data penerima pendidikan gratis dan kartu sehat gratis ini yang mengakibatkan salah sasaran dan kesulitan dalam proses pendistribusiannya. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mengumpulkan data yang akurat sehingga fasilitas ini dapat diberikan kepada semua warga sipilnya yang membutuhkan dan layak mendapatkannya.

### **III. Kesimpulan**

Kemiskinan merupakan salah satu isu global yang dihadapi dunia internasional saat ini. Indonesia juga sedang berjuang dengan masalah ini. Sekitar 27,76 juta penduduk sipil Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jika masalah kemiskinan ini terus diabaikan maka dapat menyebabkan masalah bagi negara di masa depan. Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar fundamentalnya. Namun masih terdapat kesalahan penerjemahan dan implementasi tentang Pancasila. Seluruh rakyat Indonesia harus memahami dan menerapkan nilai-nilai yang dijunjung Pancasila dan bahu-membahu mengentaskan kemiskinan. Jika Pancasila diimplementasikan dengan benar, dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang diderita Indonesia.

### **Bibliography**

- Amalia, Fitri. 2012. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. *Econosains* (Online). (<http://econosains.com/index.php/agustus-2012/30-pengaruh-pendidikan-pengangguran-dan-inflasi-terhadap-tingkat-kemiskinandikawasan-timur-indonesia-kti-periode-2001-2010>, diakses 27 Februari 2013).
- BAPPENAS. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Januari 2005.
- Gujarati, Damodar N. 1995. *Basic Econometrics*. Third Edition. Singapore: Mc. Graw-Hill.

- Gunawan, Mujiyadi, Styosoemarno. 2006. Pengembangan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sekitar Kawasan Industri. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Harlik, Amri Amir & Hardiani. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 2.
- Jhingan, M. L, 2010. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Kementrian Kesehatan. 2010. MDGs Tanggung Jawab Pemerintah kepada Masyarakat . [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id).
- Mahsunah, Durrotul. 2013. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya.
- Nasir, M. Muh, Saichudin dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Jakarta : Lipi.
- Wahyuni, Tri. 2010 . Implementasi Program Raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sharp, A.M, Registres, C. A., Grimes, P. W. 2000. Economics of Sosial Issues, edisi ke 12. Richard D. Irwin, Chicago, bab VII.